



Community-Based Disaster Risk Management through the Disaster-Resilient Village Program at the Regional Disaster Management Agency of Pesisir Selatan Regency

Riswanto Bakhtiar¹, M. Takdir,² Ririn Sepriani³

haris.unespdg@gmail.com¹

Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara, Nahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Ekasakti

ABSTRACT

This research is motivated by disaster risk management based on disaster-resilient villages in the Pesisir Selatan district. The study aims to understand how the Destana community and the Regional Disaster Management Agency (BPBD) manage disaster risks in Pesisir Selatan. This research uses a qualitative method that describes the results of community-based disaster risk management in Pesisir Selatan, including the challenges and efforts in managing disaster risks. The sampling technique used is purposive sampling. The results indicate that disaster risk management in Pesisir Selatan emphasizes that the effectiveness of disaster response heavily relies on systematic communication and education for the community. Through the Disaster-Resilient Village program, this strategic approach not only builds community capacity to face disaster risks but also strengthens collaboration between the government and related agencies. The award from BNPB to Painan Selatan demonstrates the positive potential of this program. Additionally, the use of social media for communication and coordination between BPBD and disaster-resilient villages allows the community to remain vigilant against potential threats. The establishment of disaster-resilient village communities also requires active participation from all layers of society in organization and decision-making, reflecting that disaster risk reduction is a shared responsibility, not just the government's. However, there are still challenges faced by the local government, including budget shortages, community understanding, and a lack of resources in the regional disaster management agency. Nevertheless, the government has made several efforts, including allocating village budgets, advocating, and continuously providing education to the community.

Keywords: Disaster Risk Management, Destana Community, Regional Disaster Management Agency (BPBD)

PENDAHULUAN

Ditinjau dari kondisi geografis, geologis dan hidrometeorologi, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki karakteristik daerah yang rentan terhadap bencana. Kabupaten Pesisir Selatan terletak di sepanjang pantai yang sering terjadi gempa bumi dan bisa menyebabkan bencana tsunami. Badan penanggulangan bencana daerah yang biasa disingkat BPBD merupakan lembaga pemerintah non departemen daerah yang memiliki tugas sebagai pelaksana kewenangan otonomi daerah di bidang pembangunan penanggulangan bencana Kabupaten Pesisir Selatan .¹

¹ Laporan kinerja badan penanggulangan bencana daerah kab.pessel tahun 2017. Hal 1-2

Kabupaten Pesisir Selatan juga termasuk Kabupaten yang memiliki BPBD karena termasuk daerah berpotensi mengalami bencana dan sebagai mini market bencana diprovinsi Sumatra Barat ada pun bencana yang dimaksud adalah: Gempa Bumi Dan Tsunami, Abrasi Pantai/Sungai, Longsor, Angin Badai, juga bencana yang di akibatkan oleh aktifitas manusia dalam mengelola sumber daya alam dan baru- baru ini yang sangat merugikan masyarakat Pesisir Selatan adalah banjir bandang /galodo. Yang mana akibat dari banjir ini menyebabkan kerugian yang lumayan besar di berbagai Kecamatan yang ada di Pesisir Selatan. Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) memiliki peran yang penting dalam pengelolaan resiko bencana di Pesisir Selatan.²

Berdasarkan data dari informasi dari (BPBD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan menjadi salah satu daerah di Sumatra Barat yang semua bencana seperti: banjir bandang, tsunami, longsor, angin puting beliung dll. Banjir bandang sering kali meluluh lantahkan daerah Pesisir Selatan, menyebabkan kerusakan yang besar dan merugikan banyak orang. Penyebab utama terjadinya banjir bandang adalah curah hujan yang tinggi dalam kurun waktu singkat sehingga menyebabkan sungai-sungai yang berada di daerah perbukitan meluap, membanjiri daerah daratan rendah di sekitarnya . banjir bandang adalah ancaman serius bagi kehidupan dan properti di daerah Pesisir Selatan. Akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi pada tanggal 7-8 maret 2024 lalu dengan beberapa lokasi terparah di Pesisir Selatan adalah Kecamatan Koto XI Tarusan, Kecamatan Sutera Nagari Ganting Mudik Utara Surantih, Nagari koto Rawang, Kampung Tanjung. Bencana ini menyebabkan 33 korban meninggal dunia, 223 ribu jiwa mengungsi, dan infrastruktur seperti 29 ribu rumah warga, 11 jembatan, dan 6 ribu hektar lahan pertanian. Diduga disebabkan oleh aktifitas pembalakan liar di hulu sungai , hujan ekstrem, jenis tanah yang mudah pecah dan hancur serta kondisi geografis juga sangat berpengaruh, tebing kemudian jalan dan langsung kesungai luncuran air cepat. hal ini terbukti dengan banyaknya kayu-kayu besar yang berserakan dan ada juga yang menghantam beberapa rumah warga.³

Berdasarkan undang-undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Indonesia) bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; penyelenggara penanggulangan bencana dilakukan pada tahap pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana, karena masing-masing tahapan mempunyai karakteristik penanganan yang berbeda; pada saat tanggap darurat, kegiatan penanggulangan bencana selain didukung dana APBN dan APBD juga disediakan dana siap pakai dengan pertanggung jawaban melalui mekanisme khusus; dan pengawasan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, yang dapat disebabkan oleh faktor alam, non alam, maupun manusia.⁴ Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.⁵

Pengelolaan resiko bencana berbasis komunitas (PRBBK) adalah pilar penting dalam upaya pengelolaan resiko bencana saat ini. PRBBK umum di terima oleh kalangan ahli bencana karena selama ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan struktural/fisik semata dan fokus

² Ibid hal 3-5

³ Rekap kejadian bencana banjir dan longsor tanggal 7-8 maret 2024 badan penanggulangan bencana daerah

⁴ Undang-undang republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana

⁵ Purwanto ,sigit,, sumino dkk 2021 *pengkajian Resiko bencana partisipatif* hal 5.

pada kedaruratan serta pendekatan dari atas kebawah yang kurang membantu dalam pengurangan resiko bencana berkelanjutan.⁶

Penanggulangan bencana adalah sebuah proses sistematis dengan menggunakan keputusan administrative, organisasi, keterampilan operasional, kapasitas implementasi, strategi, dan kapasitas dari masyarakat dalam mengurangi dampak bencana alam, lingkungan, maupun bencana teknologi.⁷

Alasan peneliti memilih komunitas desa karena keberadaan program Desa Tangguh Bencana di Pesisir Selatan menunjukkan keterlibatan komunitas lokal yang aktif dalam mitigasi bencana, sehingga memungkinkan untuk mengeksplorasi peran serta masyarakat dalam upaya tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi berbasis data bagi Badan Penanggulangan Daerah setempat dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif. Dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi praktik-praktik inovatif dalam penanggulangan bencana, serta menganalisis kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. Secara keseluruhan, Kabupaten Pesisir Selatan merupakan lokasi yang strategis untuk mengkaji bagaimana penanggulangan pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas dapat diimplementasikan secara efektif.

Desa tangguh bencana (Destana) merupakan desa yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya. kemampuan mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi resiko bencana.⁸

Program destana ini merupakan amanah undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana mengamanatkan untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana. strategi untuk mewujudkan hal ini adalah dengan melakukan pengembangan Desa/Kelurahan tangguh terhadap bencana dalam upaya pengurangan resiko bencana berbasis komunitas (PRBBK). Dalam proses pengelolaan bencana melibatkan secara aktif masyarakat dalam siap siaga, menganalisis, menangani, memantau dan mengevaluasi resiko bencana untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan kemampuan dalam menghadapi bencana.⁹

METODE PENELITIAN

penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana tempat penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Painan Kabupaten Pesisir Selatan. menurut Saryono penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Perbedaan dengan penelitian kuantitatif adalah penelitian ini berangkat dari observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.¹⁰ berdasarkan teknik purposive sampling akhirnya penulis tetapkan sampelnya dalam penelitian ini yaitu 9 (Sembilan) orang sampel yang sudah dianggap mewakili populasi. jadi penelitian kualitatif ini bertujuan untuk melihat bagaimana badan

⁶ Lassa, jonathan, dkk. 2022. *panduan PRBBK konsep pengelolaan Resiko bencana berbasis komunitas*. Hal 5.

⁷ Ibid hal 1

⁸ Fatharani, rosyad, Muhammad lalu. Tahun 2023 *Efektivitas Program Desa Tangguh Bencana Dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat*.

⁹ Undang-undang republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana

¹⁰ Dr. Nasution, Fattah Abdul, M.PD 2023 *metode penelitian kualitatif*. Hal 34

penanggulangan bencana daerah Kabupaten Pesesir Selatan mengelola resiko bencana melalui komunitas desa tangguh bencana di setiap nagari yang ada di Kabupaten Pesesir Selatan .

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan resiko bencana berbasis komunitas desa tangguh bencana di badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Pesesir Selatan

Berdasarkan data yang telah peneliti dapatkan melalui wawancara dengan beberapa narasumber dalam penelitian bagaimana Pengelolaan resiko bencana berbasis komunitas desa tangguh bencana di badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Pesesir Selatan antara lain:

a. Pengeloalan

Pengelolaan resiko bencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari bencana alam atau buatan manusia. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang dapat terjadi akibat bencana dalam suatu daerah dan periode tertentu. efektivitas pengelolaan penanggulangan bencana sangat bergantung pada upaya sistematis dalam menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Dengan melibatkan semua lapisan masyarakat, diharapkan tingkat kesiapsiagaan dan kemampuan respons terhadap bencana dapat meningkat, sehingga risiko yang dihadapi dapat diminimalkan.

b. Pengambilan keputusan

pembentukan komunitas desa tangguh bencana memerlukan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengorganisasian dan pengambilan keputusan. Hal ini terlihat dari praktik yang diterapkan di Nagari Ampiang Pulai, di mana setiap individu, tanpa memandang latar belakang pendidikan atau kondisi fisik, diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang). Dan juga pemerintah daerah sudah menegaskan bahwa pengurangan resiko bencana bukanlah hanya tugas pemerintah tetapi menjadi tangguh jawab semua lapisan masyarakat.

c. Edukasi masyarakat

pelatihan yang di berikan kepada masyarakat dengan nagari rawan bencana sudah dilakukan dengan baik dengan memberikan sosialisasi, pelatihan dan juga cara-cara bagaimana mengevakuasi korban. Hal ini bertujuan untuk agar masyarakat bisa memberikan pertolongan pertama pada korban yang terkena bencana selagi menunggu bantuan dari pemerintah daerah. pemerintah daerah dan pemerintah nagari bekerja sama untuk memberikan pemahaman dan himbauan kepada masyarakat sehingga masyarakat paham akan pentingnya pengurangan resiko bencana dilakukan agar meminimalisir kerugian. pemerintah daerah badan penanggulangan bencana daerah berupaya menyampaikan informasi melaluisepanduk, baliho juga menginformasikannya di radio dan juga setiap sosial media Kabupeten Pesisir Selatan.

d. Evaluasi

pemerintah nagari telah melaksanakan monitoring dan evaluasi program pengelolaan risiko bencana dengan pendekatan yang langsung terhubung dengan masyarakat, menjelaskan bahwa mereka melakukan evaluasi dengan turun ke lapangan, mengadakan sosialisasi, dan menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan tanggapan dari masyarakat. Metode ini tidak hanya memastikan partisipasi aktif masyarakat, tetapi juga memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan program. Ia menginformasikan bahwa evaluasi dilakukan dua kali dalam setahun, sebelum dan setelah kegiatan, yang menunjukkan adanya peningkatan dalam penanganan bencana. meskipun dari 182 nagari, hanya sekitar 55-57 desa yang benar-benar siap dalam penanganan bencana, hal ini menunjukkan pentingnya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas komunitas. Keseluruhan proses monitoring dan evaluasi ini mencerminkan komitmen pemerintah

nagari dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana, serta mengidentifikasi area yang masih memerlukan perhatian dan pengembangan lebih lanjut.

Sesuai dengan teori Gorge R. Terry, 1958 dalam bukunya *principles of Management*, pengelolaan resiko bencana berbasisi komunitas desa tangguh bencana di badan penanggulangan bencana daerah di Kabupaten Pesisir Selatan .

a) Planning (perencanaan)

Dalam mewujudkan desa tangguh bencana di Kabupaten Pesesir Selatan pemerintah daerah melalui BPBD melakukan perencanaan yang matang, yang bertujuan untuk pengembangan program desa tangguh bencana. Hal ini melibatkan identifikasi potensi resiko dan penyusunan strategi untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, termasuk pelatihan dan simulasi untuk menghadapi bencana. Dalam perencanaan ini, pemerintah daerah harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Karena seluruh lapisan masyarakat bertanggung jawab akan pengurangan resiko bencana bukan hanya tugas pemerintah saja.

b) Organizing (Pengorganisasian)

pembentukan struktur organisasi yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan resiko bencana. Komunikasi dan koordinasi antara BPBD dan komunitas desa tangguh bencana sangat penting, terutama pada saat keadaan darurat. Dikarenakan Kabupaten Pesesir Selatan memiliki daerah yang memanjang di sepanjang garis pantai membuat BPBD sulit untuk terjun langsung kelapangan dengan itu melalui penggunaan media sosial, seperti grup WhatsApp, informasi tentang potensi bencana dapat disebarkan secara cepat dan efisien, untuk memastikan masyarakat tetap siaga dalam menghadapi bencana.

c) Actuating (pelaksanaan/penggerakan)

Setelah perencanaan dan pengorganisasian, pelaksanaan menjadi kunci untuk menerapkan strategi yang telah disusun, yaitu dengan melakukan pelatihan bagi masyarakat tentang mitigasi bencana dan langkah-langkah evakuasi. Pelatihan dan simulasi ini bertujuan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan yang diperlukan dalam situasi darurat, sehingga mereka dapat memberikan pertolongan pertama sebelum bantuan dari pemerintah tiba.

d) Controlling (Pengendalian)

Evaluasi berfungsi untuk menilai efektivitas program pengelolaan resiko bencana yang telah dilaksanakan. Melalui monitoring dan pengumpulan data dan melihat kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana, pemerintah dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masyarakat dalam pengelolaan resiko bencana. Evaluasi dilakukan secara berkala dengan menggunakan kuesioner dan sosialisai kepada kelompok-kelompok masyarakat yang bisa membantu dalam perbaikan dan pengembangan program kedepannya.

Kendala yang dialami dalam pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas desa tangguh bencana di badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Pesesir Selatan. Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah kendala dalam pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas di Kabupaten Pesisir Selatan. Tantangan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan alokasi anggaran, yang menghambat pelaksanaan program desa tangguh bencana; kesadaran masyarakat yang bervariasi, dengan beberapa kelompok masih terpengaruh oleh pola pikir tradisional; serta kesulitan dalam proses pelatihan dan edukasi yang dipengaruhi oleh kesibukan ekonomi masyarakat. Selain itu, kurangnya pelatihan teknis bagi relawan komunitas dan keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana juga menjadi faktor penghambat yang signifikan. Untuk meningkatkan efektivitas program, diperlukan perhatian yang lebih besar dari pemerintah

daerah dalam hal pendanaan, pelatihan yang lebih spesifik, dan penguatan infrastruktur, agar masyarakat dapat lebih siap dan tanggap dalam menghadapi bencana.

2. upaya untuk kendala dalam pengelolaan resiko bencana berbasis komunitas desa tangguh bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Painan Kabupaten Pesisir Selatan

Dalam upaya mengatasi kendala pengelolaan risiko bencana di Kabupaten Pesisir Selatan, beberapa strategi telah diidentifikasi. Pertama, dalam aspek perencanaan, pentingnya alokasi dana nagari dan advokasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendanaan program desa tangguh bencana sangat jelas, mengingat keterbatasan anggaran yang ada. Kedua, pengorganisasian yang efektif melalui sosialisasi berkelanjutan kepada masyarakat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang manajemen risiko bencana. Ketiga, pelaksanaan program harus melibatkan komunikasi yang baik dan kolaborasi antara berbagai lembaga, serta penyesuaian jadwal pelatihan agar sesuai dengan kesibukan masyarakat. Selain itu, peningkatan pelatihan teknis bagi relawan komunitas menjadi krusial untuk memastikan mereka siap menghadapi situasi darurat. Terakhir, dalam aspek pengawasan, peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana, seperti rambu evakuasi, harus menjadi prioritas untuk memastikan keselamatan masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ketahanan masyarakat terhadap bencana dapat meningkat secara signifikan.

KESIMPULAN

1. pengelolaan risiko bencana di Kabupaten Pesisir Selatan menekankan bahwa efektivitas penanggulangan bencana sangat bergantung pada komunikasi sistematis dan edukasi kepada masyarakat. Melalui program Desa Tangguh Bencana, langkah strategis ini tidak hanya membangun kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana, tetapi juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan lembaga terkait. penggunaan media sosial untuk komunikasi dan koordinasi antara BPBD dan desa-desa tangguh bencana memungkinkan masyarakat tetap waspada terhadap potensi ancaman. Pembentukan komunitas desa tangguh bencana juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam pengorganisasian dan pengambilan keputusan, yang mencerminkan bahwa pengurangan risiko bencana adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah.
2. Kendala dalam pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas di Desa Tangguh Bencana di BPBD Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, meliputi beberapa isu signifikan. Keterbatasan alokasi anggaran menjadi hambatan utama yang berdampak pada efektivitas program mitigasi. Pemikiran tradisional di kalangan masyarakat, terutama alim ulama dan niniak mamak, sering kali menekankan bahwa bencana adalah kehendak Tuhan, sehingga mengurangi urgensi usaha mitigasi. Selain itu, kurangnya pelatihan teknis bagi relawan komunitas menghambat peningkatan kualitas pengelolaan risiko. Keterbatasan sumber daya manusia di BPBD, semakin memperburuk situasi, sementara sarana dan prasarana yang tidak memadai menjadi tantangan dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.
3. Upaya mengatasi kendala dalam pengelolaan risiko bencana berbasis forum Desa Tangguh Bencana di BPBD Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, meliputi beberapa langkah penting. Setiap nagari perlu mengalokasikan anggaran untuk operasional desa tangguh bencana agar mandiri. Kolaborasi antara pemerintah daerah, BNPB, dan pihak ketiga juga krusial dalam penyediaan dana. Sosialisasi intensif kepada masyarakat melalui pertemuan seperti majelis taklim dapat meningkatkan pemahaman tentang bencana. Penjadwalan pelatihan yang sesuai dengan kesibukan masyarakat dan pendekatan terstruktur dalam pelatihan akan meningkatkan

partisipasi. Advokasi untuk penambahan SDM di BPBD melalui BKPSDM akan memperkuat kapasitas organisasi.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko bencana di Kabupaten Pesisir Selatan, pemerintah daerah dan BPBD disarankan untuk memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk komunitas lokal dan lembaga non-pemerintah, guna memastikan alokasi anggaran yang memadai. Penting juga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan terstruktur dan sosialisasi intensif tentang risiko bencana. Penggunaan teknologi untuk komunikasi perlu diperluas agar informasi dapat diakses dengan mudah. Selain itu, alokasi anggaran untuk program Desa Tangguh Bencana harus diprioritaskan, dan pelatihan teknis bagi relawan komunitas perlu ditingkatkan. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program, serta penguatan sarana dan prasarana seperti rambu evakuasi dan peta risiko bencana, sangat penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana.

DARTAR PUSTAKA

Fatharani ,rosyad ,Muhammad lalu. Tahun 2023 *Efektivitas Program Desa Tangguh Bencana Dalam Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat Di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat.*

Laporan kinerja badan penanggulangan bencana daerah kab.pessel tahun 2017

Lassa, jonathan, dkk. 2022. *panduan PRBBK konsep pengelolaan Resiko bencana berbasis komunitas*

Nasution, Fattah abdul, 2023 *metode penelitian kualitatif*

Purwanto ,sigit,, sumino dkk 2021 *pengkajian Resiko bencana partisipatif*

Rekap kejadian bencana banjir dan longsor tanggal 7-8 maret 2024 badan penanggulangan bencana daerah

Sugiyono. 2009 *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&B.*

Undang-undang republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana